

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL : *a Systematic Review*

Resa Listiani<sup>1</sup>, Anisya Pebriyanti<sup>2</sup>, Muhammad Fawwaz<sup>3</sup>, Novita Dwi Istanti<sup>4</sup>

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta<sup>1,2,3,4</sup>

2010713017@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>1</sup>, 2010713026@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Implementasi kebijakan adalah salah satu tindakan dalam menentukan perkembangan baik dan buruknya sebuah program yang dijalankan institusi, salah satunya adalah kebijakan jaminan kesehatan nasional yang dijalankan pemerintah. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan sejak 1 Januari 2014 berarti program ini sudah berjalan sekitar 5 tahun lebih. Literatur dilakukan untuk mencari tahu implementasi dari kebijakan program jaminan kesehatan nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *systematic review* yang diambil dari beberapa jurnal menggunakan database Google Scholar dengan kata kunci: Implementasi, Jaminan Kesehatan Nasional, Kebijakan Kesehatan. Literatur menggunakan sejumlah jurnal berbahasa Indonesia diambil berdasarkan penerbitan lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2022 serta diteliti sesuai dengan kriteria inklusi peneliti. Hasil literatur ini menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan program jaminan kesehatan nasional sudah berjalan dengan baik, tetapi masih adanya beberapa lapisan masyarakat yang mengalami kendala. Permasalahan yang diangkat dalam literatur ini adalah masyarakat belum merasakan dampak dari program jaminan kesehatan nasional secara merata serta masyarakat belum menerima info mekanisme pengobatan program jaminan kesehatan nasional. Disimpulkan dari kendala dan masalah yang terjadi dari program jaminan kesehatan nasional disebabkan kurangnya sumber daya untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antara pemangku kebijakan, tenaga kesehatan dan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik kepada tenaga kesehatan dan masyarakat secara merata.

**Kata Kunci** : Implementasi, JKN, kebijakan kesehatan.

### ABSTRACT

*Policy implementation is one of the actions in determining the good and bad development of a program run by an institution, one of which is the national health insurance policy run by the government. The National Health Insurance Program (JKN) was launched on 1 January 2014, meaning this program has been running for more than 5 years. Literature was conducted to find out the implementation of the national health insurance program policies. The approach used in this study is a systematic review method taken from several journals using the Google Scholar database with the keywords: Implementation, National Health Insurance, Health Policy. The literature uses a number of Indonesian-language journals taken based on the publication of the last five years, namely from 2017 to 2022 and researched according to the researcher's inclusion criteria. The results of this literature indicate that the implementation of the national health insurance program policies has been going well, but there are still several layers of society experiencing problems. The problems raised in this literature are that people have not felt the impact of the national health insurance program evenly and the people have not received information on the mechanism of treatment for the national health insurance program. Concluded from the constraints and problems that occur from the national health insurance program due to a lack of resources for communication and coordination between policy makers, health workers and the community. Therefore, it is suggested that the government can establish good communication and coordination with health workers and the community evenly.*

**Keywords** : Implementation, National Health Insurance, Health Policy

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi yang harus didapatkan setiap manusia, hal ini juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 9 yang menyebutkan bahwa masyarakat terjamin hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memelihara kesehatan, dan mencegah penyakit penyebab kematian. Oleh karena itu, dibutuhkan nya suatu jaminan kesehatan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada tanggal 1 Januari 2014 program Jaminan Kesehatan Nasional resmi diluncurkan oleh pemerintahan Indonesia. Program ini memberikan kemanfaatan pada layanan promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Program JKN yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dimaksudkan agar rakyat Indonesia (peserta JKN) bisa mendapatkan manfaat dari pemeliharaan kesehatan serta mendapat perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan cara meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2004).

Program JKN dilaksanakan dalam bentuk BPJS Kesehatan. BPJS kesehatan merupakan bentuk perubahan dari PT Askes yang sebelumnya menjadi penyelenggara jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asuransi Kesehatan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk melaksanakan program asuransi kesehatan di Indonesia (Nuryati et al., 2016). Selain itu, Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sejalan dengan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan sudah berjalan 5 tahun lebih sampai saat ini. Program JKN sudah dirasakan masyarakat, namun faktanya tidak semua masyarakat merasakan Program JKN disebabkan beberapa hal seperti kurangnya informasi dari mekanisme pelayanan Program JKN dan masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk melakukan pendataan dalam mendapatkan hak atas jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah. Masyarakat yang berada di daerah pedalaman juga menjadi kendala utama yang terjadi dari Program JKN sehingga belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Program JKN ini seperti masih belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah, ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan yang belum didukung, serta jumlah sumber daya manusia yang dirasakan kurang sejak Program JKN diluncurkan (Putra, 2014).

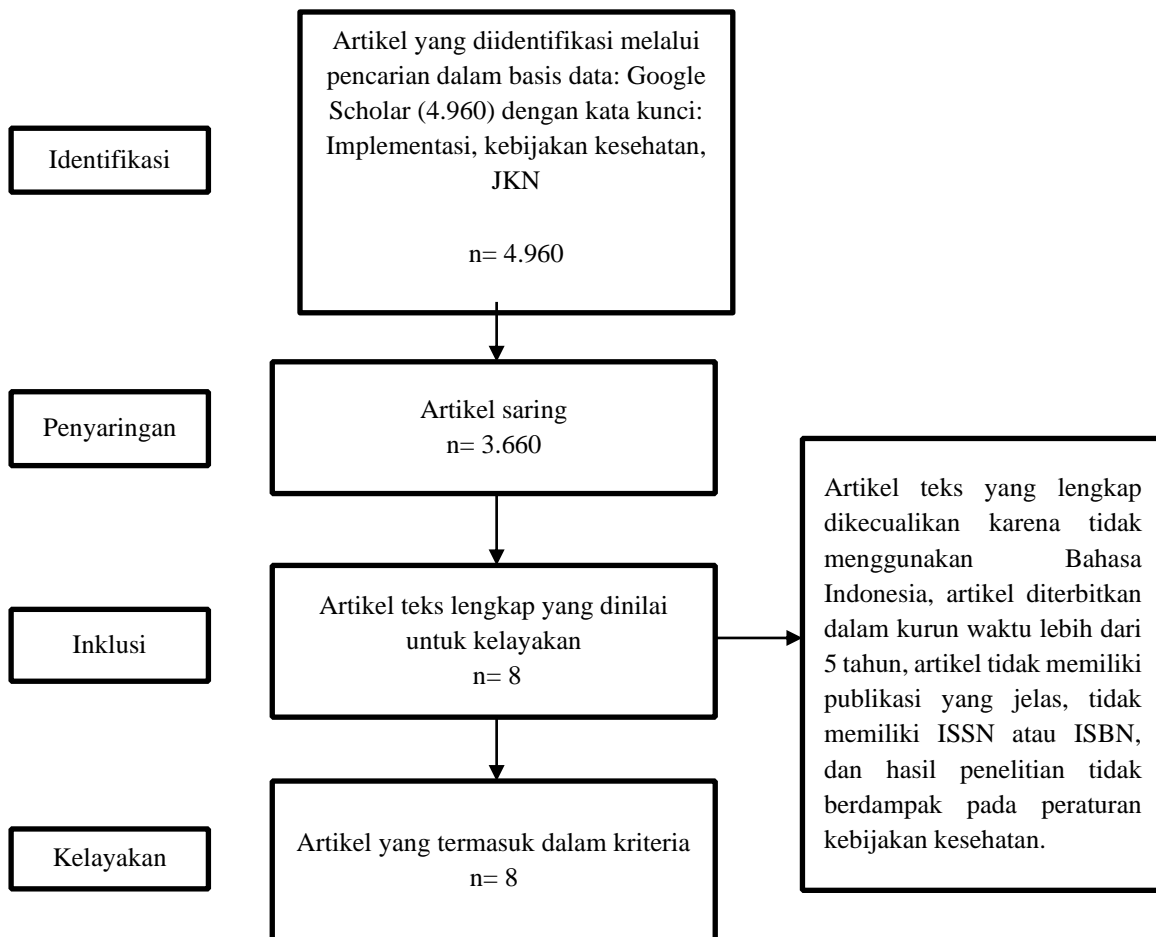
Selain itu, dengan Program JKN seharusnya Pemerintah Indonesia bisa dan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat yang baik terutama dalam aspek kesehatan. Namun dalam implementasinya, JKN menghadapi berbagai hambatan dan kendala sehingga terjadi banyak permasalahan di masyarakat. Salah satu masalah yang sering kali nampak adalah kepesertaan dan pelayanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia secara merata.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan data sekunder yang diperoleh dari metode inklusi diperoleh 8 sumber studi literatur artikel ilmiah yang sudah dinilai kelayakannya. Metode pencarian studi literatur dengan menggunakan situs *online* melalui pencarian dalam basis data yakni Google Scholar. Kata kunci pada penelitian ini meliputi: Implementasi, JKN, kebijakan kesehatan. Artikel yang diperoleh kemudian disaring kembali menurut tahun diterbitkannya dalam

kurun waktu 5 tahun terakhir atau antara tahun 2018 sampai tahun 2022 dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Artikel tersebut tersedia berdasarkan dengan relevansi, teks yang lengkap, memiliki *International Standard Serial Number* (ISSN) dan *open access*. Pada penelitian ini kriteria inklusi adalah Implementasi Program kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dan hasil dari penelitian ini akan berdampak bagi pemegang kebijakan dan peserta JKN, sedangkan kriteria eksklusi meliputi : artikel diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun lebih, tidak memiliki teks yang lengkap serta tidak menggunakan Bahasa Indonesia, artikel bersumber dari publikasi yang tidak jelas, tidak memiliki nomor *International Standard Serial Number* (ISSN) serta tidak *open access*, dan hasil penelitian tidak berhubungan dengan Implementasi program kebijakan JKN.

Penelitian ini menggunakan metode kajian sistematik PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review*) yang meliputi identifikasi, penyaringan, inklusi dan kelayakan, kemudian dianalisis berdasarkan temuan artikel. Artikel yang sesuai kriteria akan dikaji agar mendapatkan data terkait dengan Implementasi Program kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian seluruh temuan akan didata dan disajikan beserta penjelasan naratif mengenai Implementasi Program kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional. Setelah data mengenai Implementasi Program kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional didapatkan maka akan dibuat kesimpulan.



Skema 1. Diagram Alur Proses Seleksi dan Pemilihan Artikel

## HASIL

Dari 4.960 artikel yang diidentifikasi kelayakannya, kemudian sebanyak 4.952 artikel yang dikeluarkan karena tidak memenuhi metode kriteria inklusi yang sudah ditetapkan. Dari 8 sumber studi literatur penelitian yang diambil, berasal dari berbagai daerah di Indonesia yakni Sulawesi Selatan, Bekasi, Bandung, Aceh Timur, Denpasar Barat atau Bali, Sumatera Utara dan Malang.

**Tabel 1. Penjelasan Jurnal Analisis Implementasi Program kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional**

Penulis/Tahun	Tempat	Judul	Metode	Hasil
Imanudin, M. <i>et al.</i> , 2018	Sulawesi Selatan	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional	<i>Field research</i> , dan <i>Library Research</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi jaminan kesehatan nasional sudah cukup baik. Namun, dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat daerah melalui program jaminan kesehatan nasional masih belum maksimal karena ada beberapa kendala terkait dengan pendataan warga.
Alamsyah, K. <i>et al.</i> , 2021	Bekasi	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan terdapat faktor- faktor yakni faktor standar, ukuran dan tujuan kebijakan, serta sumber-sumber daya, faktor karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait serta kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan faktor lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Namun, dalam implementasinya faktor-faktor tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif.
Nugroho, E. <i>et al.</i> , 2021	Bandung	Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bandung	Kualitatif, dan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi substansi dan konteks pelaksanaan program kebijakan JKN telah terlaksana dengan baik. Namun, terdapat kendala dalam pencatatan kependudukan di tingkat Kelurahan data BDT belum terupdate secara optimal.
Juniati, Z. 2022	Aceh Timur	Implementasi Kebijakan Bpjs Dalam Meningkatkan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Aceh Timur	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pelayanan JKN di RS Mahmud telah efektif. Namun, terdapat kendala terkait pelaksanaan program kebijakan BPJS dan pelayanan JKN, yakni: fasilitas, pelayanan, dan iuran BPJS.

Suryani, I. and Rasyid, M. H. Al. 2021	Bekasi	Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi.	Kualitatif, dan deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program kebijakan JKN yakni BPJS Kesehatan sudah berjalan dengan efektif. Namun, terkait klaim peserta BPJS Kesehatan di RSUD Bekasi yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan defisit pendapatan yang dialami bagian Obligasi.
Ardani, N. M. and Rai, G. G. 2020	Denpasar Barat, Bali	Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Barat	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program kebijakan JKN terkait Faktor komunikasi kurang optimal dilaksanakan oleh pemerintah, karena masih adanya masyarakat yang belum menjadi anggota Jaminan Kesehatan, masih ada lapisan masyarakat yang tidak memahami prosedur dan cara berobat dengan menggunakan layanan Jaminan Kesehatan, serta belum sepenuhnya masyarakat mengetahui prosedur pemanfaatan Jaminan Kesehatan pada pelayanan kesehatan baik itu rawat jalan maupun rawat inap
Mifta, Nurzanna. <i>et al.</i> , 2022	Sumatera Utara	Implementasi Program Kesehatan di Puskesmas Bandar Khalipah	Kualitatif, dan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Program kebijakan JKN yakni BPJS kesehatan di Puskesmas Bandar Khalifah telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan regulasi kebijakan BPJS Kesehatan.
Hasrillah. <i>et al.</i> , 2022	Malang	Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program BPJS Kesehatan (Studi Pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang)	Kualitatif, dan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BPJS di Puskesmas Kedungkandang sudah berjalan cukup baik, dengan adanya program BPJS masyarakat dapat lebih mudah berobat dan tidak sulit dalam pemberkasan dokumen seperti sistem Kesehatan sebelumnya. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi.

Berdasarkan tabel hasil, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional sudah berjalan dengan baik dan efektif. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya.

## PEMBAHASAN

### Implementasi kebijakan program jaminan kesehatan nasional

Implementasi kebijakan adalah tahap yang memiliki nilai yang sangat penting. Tahap ini akan menentukan bagaimana baik dan buruknya kebijakan yang dibuat untuk masyarakat. Dalam

implementasi ini juga menjadi suatu proses terjadinya beberapa rangkaian aktivitas yang akan berkelanjutan. Tujuan dalam kebijakan yang dibuat, diharapkan pelaksana atau masyarakat dapat memahami dengan baik agar mendapatkan hak atas dasar dan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut diperkuat juga oleh pendapat para ahli. Misalnya, Van Metter dan Van Horn (AG. Subarsono, 2005: 99), (Djiko & Tangkau, 2014), menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Dalam pemahamannya terdapat keseiramaan representasi persoalan eksistensi-tendensi (alur implementasi program jaminan kesehatan nasional) kebijakan pilar variabel tersebut. Kelima variabel tersebut yang pertama standar dan sasaran kebijakan, kedua sumber daya, ketiga komunikasi antara organisasi dengan penguatan aktivitas, keempat karakteristik seorang pelaksana dan yang kelima kondisi dan situasi sosial, ekonomi, dan politik.

Hasil identifikasi artikel penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat sudah berjalan dengan baik, tetapi masih adanya beberapa lapisan masyarakat yang mengalami kendala seperti, belum tersampainya tata cara dan proses pengobatan dengan menggunakan Jaminan Kesehatan, belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk melakukan pendataan dalam mendapatkan hak atas jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah. Dalam proses penerapan kebijakan kesehatan, menurut Marille S Grindle (1980), (Basuki et al., 2016) keberhasilan sebuah kebijakan terbagi menjadi dua bagian yaitu: pertama adalah isi kebijakan, dan yang kedua adalah tempat kebijakan dilaksanakan. Dalam isi pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat adanya kebutuhan kelompok sasaran, jenis manfaat, proses mufakat, derajat perubahan, pelaksana program, dan yang terakhir yaitu adanya sumber daya.

Ada beberapa faktor penghambat yang dapat menyebabkan masalah, yaitu masih kurangnya fasilitas penunjang kesehatan, ditambah dengan sumber daya manusia yang tersedia tidak memenuhi standar kualitas dan kuantitas. Ketersediaan sumber daya yang cukup akan memberikan dampak yang baik untuk menjalankan inisiatif dari kebijakan kesehatan yang telah dibuat. Tidak hanya sumber daya manusia yang terpenuhi, komunikasi dan koordinasi antara pemangku kebijakan, tenaga kesehatan dan masyarakat harus terjalin dengan baik agar dapat memberikan pelayanan dengan maksimal. Minimnya kesadaran masyarakat dalam memahami regulasi diberikan pada Program JKN juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga seringkali menimbulkan kerumitan bagi pelaksana atau masyarakat dalam mendapatkan manfaat dari Program JKN, hal ini dibuktikan pada saat masyarakat yang akan mengakses kepesertaan atau pendataan masyarakat dalam keikutsertaan Program JKN tetapi tidak terdaftar. Sehingga masih rendahnya kepesertaan JKN disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, masyarakat tidak mengetahui dan tidak menyadari pentingnya program JKN yang berfungsi sebagai asuransi kesehatannya (Rohmatullailah et al., 2021).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil identifikasi artikel yang kami gunakan, dalam pengimplementasian kebijakan kesehatan nasional sudah cukup baik tetapi masih adanya terdapat golongan masyarakat yang belum mendapatkan manfaat yang dihasilkan oleh Program JKN yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya yang ada untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antara pemangku kebijakan, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, yang membuat sulitnya mendapatkan informasi terkait Program JKN. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap kepentingan kesehatan juga merupakan faktor yang melatar belakangi, masyarakat masih



kurang memahami atas kebijakan yang ada dalam Program JKN yang dapat mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan atau menggunakan fasilitas yang diberikan. Dari hasil kesimpulan maka disarankan agar pemerintah dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik, hal ini akan memberikan dampak yang banyak untuk masyarakat mendapatkan informasi terkait Program JKN. Sebuah program sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder (pemerintah) kepada program tersebut (Suprianto & Mutiarin, 2017). Saran lain yang tidak kalah penting yaitu pemerintah harus dapat mempersiapkan dan memberikan penunjang fasilitas dan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai kuantitas dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan dengan maksimal.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak mengurangi rasa hormat, kami berikan kepada Bapak Arga Buntara, S.KM., MPH dan Ibu Dr. Novita Dwi Istanti, SKM, MARS selaku dosen pengampu mata kuliah Peraturan Kebijakan Kesehatan program studi S1 Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta serta seluruh rekan yang berkontribusi. Dengan rasa syukur yang begitu tulus, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan penulisan artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, K., Niken Prastiwi, E. and Salamah, U. (2021) 'Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi', *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), pp. 107–121. doi: 10.23969/kebijakan.v12i2.3755.
- Ardani, N. M. and Rai, G. G. (2020) 'Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Puskesmas Li Denpasar Barat', *Jurnal Widya Publika*, 8(1), pp. 37–60. doi: 10.47329/widyapublika.v8i1.639.
- Basuki, E. W., Sulistyowati, & Herawati, N. R. (2016). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Kesehatan Di Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science Tahun*, 5(04), 1. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/>
- Depkes RI, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Djiko, R., & Tangkau, C. H. S. (2014). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara. *Administrasi Publik*, 1(1), 127–136 .
- Hasrillah. Hayat .Yaqub, C. (2021) ' p. 2869–2882.
- Juniati, Z. (2022) 'Implementasi Kebijakan Bpjs Dalam Meningkatkan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Aceh Timur', 02, pp. 1–22. Available at: <http://eprints.umm.ac.id/23471/2/jiptummpp-gdl-faisalridh-41908-2-babi.pdf>.
- Mifta Nurzannah, Nurhamidah, Loviga Ananda Carolina Br Purba, Fitriani P Gurning, SKM, M.Ke Tambunan, K. (2022) 'Implementasi Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Bandar Khalipah', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), pp. 129–138.
- Muhammad Imanuddin Taqwa Karim, A. Pangeran Moenta, M. R. (2018) 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional', *Hasanuddin Law Review*, 3(2), pp. 104–116. doi: 10.20956/halrev.v3i2.1050.
- Nugroho, E. B., Setiabudhi, W. and Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bandung. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Pemerintahan*, 7(3), 493–511. Diambil dari <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2483>.
- Nuryati, Budi, S. C., & Rokhman, N. (2016). 'Kendala Pelaksanaan Program JKN Terkait Penerimaan Pasien, Pengolahan Data Medis, Pelaporan, Dan Pendanaan JKN Di Puskesmas Gondokusuman Ii Yogyakarta'. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.33560/jmiki.v4i1.96>.
- Putra, W. M. (2014). *Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2014*.
- Rohmatullailah, D., Agustina, D., Rahmansyah, F., K, N. T., Anasta, N., & Fauziyyah, R. (2021). Peningkatan Pengetahuan Tentang JKN dengan Sosialisasi dan Pembentukan Kader JKN Kota Bogor. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 110–118.
- Suprianto, A., & Mutiarin, D. (2017). 'Evaluasi Pelaksanaan Jaminan kesehatan Nasional (Studi Tentang Hubungan Stakeholder, Model Pembiayaan Dan Outcome Jkn Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)'. *Journal Of Governance And Public Policy*, 4. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4172>.
- Suryani, I. and Rasyid, M. H. Al (2021) 'Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi', 1(3), p. 505. Available at: <http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0017>.